ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI NTB

¹Edi Irawan, ²Fitriah Permata Cita, ³Evi Julianengsih

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa

*) E-mail : Evi Julianengsih20@gmail.com

ABSTRACT

his Scription aiming to find out the magnitude of inequality income in all Districts and Cites in NTB. The analysis tool of this is coefficient analysis Gini (Gini Ratio) where the result of this analystation later on to show the extent of inequality income in all Districts and Cities in NTB. The coefficient analysis Gini (Gini Ratio) result shows that the outline of all Districts and Cities in NTB Province are in high inequality catrgory, in this case described by the Districts or Cities which have >0,5 Gini Ratio score. The district which has the highest extent of inequality is in west Lombok district with 0,976 Gini Ratio score in 2017. Meanwhile in Mataram City has the most highest extent evenness with 0,537 Gini Ratio score. Inequality income is also influenced by the magnitude of the high population growth so that resulting in decreasing of income or spending in west Lombok District.

Keyword : Inequality Income and Coefficient Gini (Gini Ratio).

ABSTARK

Skripsi ini bertujuan Untuk mengetahui besarnya ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di NTB. Alat analisis yang digunakan adalah analisis koefisien Gini (*Gini Ratio*) dimana hasil analisis ini nantinya akan menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di NTB. Hasil analisis koefisien Gini (*Gini Ratio*) menunjukkan bahwa secara garis besar Kabupaten/Kota di Provinsi NTB termasuk kategori sebagai ketimpangan tinggi, hal ini digambarkan oleh Kabupaten/Kota yang memiliki nilai *gini ratio* >0,5. Kabupaten yang memiliki tingkat ketimpangan paling tinggi adalah Kabupaten Lombok Barat dengan nilai koefisien *Gini* pada tahun 2017 sebesar 0,976 sedangkan Kota Mataram memiliki tingkat pemerataan paling tinggi dengan nilai *gini ratio* adalah 0,537. ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh besarnya pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan atau pengeluaran di Kabupaten Lombok Barat.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan dan Koefisien Gini (Gini Ratio)

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ditingkat daerah dari tahun ke tahun. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Ketika pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pendapatan perkapita masyarakat tinggi dan terdistribusi secara merata maka akan tercapainya kesejahteraan ekonomi (Iswanto, 2015).

Menurut Arsyad (1999), selain pertumbuhan ekonomi, tolak ukur keberhasilan pembangunan juga dilihat dari struktur ekonomi dan kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan juga antar sektor. Distribusi yang tidak merata menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat. Bahkan bisa dikatakan bahwa kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak Negara yang sedang berkembang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tetapi tidak membawa manfaat yang berarti bagi penduduk miskin. Kemiskinan dipandang dari pendekatan ketimpangan merupakan ketidakmerataan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat, utamanya pada kelompok termiskin dengan masyarakat lainnya (Sen, 1981).

Nusa Tenggara Barat salah satu propinsi di Indonesia yang tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan. Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 11 kabupaten ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah ketimpangan pendapatan.

Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan. Data PDRB dapat dijadikan sebagai dasar penentuan target pertumbuhan ekonomi dan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan. Pengukuran dengan data PDRB dapat menggambarkan besaran alokasi masing-masing kategori dalam menciptakan perekonomian (struktur ekonomi) serta pertumbuhan per kategori disamping pertumbuhan secara total (BPS 2018).

Besarnya PDRB antar Kabupaten di NTB cukup bervariasi. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, seperti perbedaan tersedianya sumber daya alam, faktor-faktor produksi infrastruktur penunjangnya dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki wilayah tersebut perbedaan ini mengakibatkan besaran PDRB di setiap daerah berbeda cukup besar (World Bank).

Hal ini di gambarkan dengan kontribusinya terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku dan total PDRB atas dasar harga konstan Jika dilihat dari data PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2014-2016 Provinsi NTB terus mengalami peningkatan dari semua Kabupaten yang ada. Pada tahun 2014 Kabupaten Lombok Timur memiliki posisi paling tinggi nilai PDRB atas dasar harga berlaku, pada tahun 2015 dan 2016 Sumbawa Barat mengalami peningkatan yang signifikan dari semua Kabupaten yang ada dan berada diposisi paling tinggi berbeda dengan tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena di Kabupaten Sumbawa Barat kondisi geografisnya baik serta pemberdayaan sumber daya manusia yang baik, jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi NTB, pada tingkat lapangan usaha dari segi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran. Kabupaten Sumbawa Barat paling tinggi dari semua Kabupaten yang ada serta didukung Real State yang tinggi. Kota Bima berada diposisi paling rendah dengan PDRB atas dasar harga konstan berlaku pada tahun 2014-2016 karena Kota Bima masih rendah pergerakan

pertumbuhan perekonomiannya atau kurang memberdayakan potensi sumber dayanya dengan baik sehingga Kota Bima berada di urutan paling rendah.

Sedangkan total PDRB atas dasar harga konstan di setiap Kabupaten di Provinsi NTB pada tahun 2014-2016 juga mengalami peningkatan. Jika dilihat dari tabel PDRB atas dasar harga konstan tidak jauh berbeda dengan PDRB atas dasar harga berlaku, dimana Pada tahun 2014 Kabupaten Lombok Timur memiliki posisi paling tinggi nilai PDRB atas dasar harga konstan, pada tahun 2015 dan 2016 Sumbawa Barat mengalami peningkatan yang signifikan dari semua Kabupaten yang ada dan berada di posisi paling tinggi berbeda dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi NTB karena didukung oleh kondisi yang baik serta pengelolaan kualitas sumber daya manusia baik.

Berdasarkan uraian diatas, kondisi perekonomian masyarakat secara umum belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sama dan masih ditemui kekurangan, diantaranya ketimpangan pendapatan antar wilayah dalam pencapaian tingkat perekonomian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah berapa besar ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di NTB.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui besarnya ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di NTB.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menerapkan suatu model kebijakan dimasa yang akan datang.

2. Landasan Teori

A. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Hajiji (2010), menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan, hal ini karena ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan yang tentunya akan mahal. Distribusi pendapatan dapat berwujud pemerataan maupun ketimpangan, yang menggambarkan tingkat pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi (Rahayu, 2000).

Alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan yaitu menggunakan koefisien gini (gini Ratio) dan Kurva Lorenz dimana Gini Ratio adalah untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan (Suryana, 2007). Sedangkan kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima dalam kurun waktu tertentu. Sumbu gorizontal menunjukkan jumlah penerima pendapatan yang digambarkan dalam persentase kumulatif, sumbu vertikal menunjukkan bagian jumlah penghasilan yang diterima oleh masing-masing persentase populasi.

3. Metodologi Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu menitikberatkan kepada perhitungan statistic (Surakhmad, 1985).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi NTB yaitu pada semua Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi NTB mulai dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram dan Bima. Yang diukur pada tahun 2017.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data jumlah penduduk antar Kabupaten/Kota dan konsumsi perkapita rumah tangga yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 2018.

D. Metode Analisis

Untuk melihat ketimpangan pendapatan yang terjadi digunakan indeks Koefisien Gini (Gini Ratio), yaitu (Suryana, 2007):

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_p (F_{c-1} + F_c)$$

Dengan, GR = Angka *Gini Ratio*

f_p = Proporsi penduduk pada kelompok pengeluaran ke-i

F_c = Kumulatif proporsi pengeluaran pada kelas pengeluaran ke-i

F_{c-1} = Kumulatif proporsi pengeluaran pada kelas pengeluaran ke (i-1)

4. PEMBAHASAN

A. Gini ratio antar Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi antar wilayah dapat dilihat melalui jumlah penduduk dan jumlah pengeluaran, dimana menurut teori Keynes bahwa pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pendapatan masyarakat.

Tabel 1
Gini Ratio antar Kabupaten/Kota di
Provinsi NTB

Kabupaten/Kota	Gini Ratio
Lombok Barat	0.976
Lombok Tengah	0.917
Lombok Timur	0.816
Sumbawa	0.891
Dompu	0.915
Bima	0.777
Sumbawa Barat	0.913
Lombok Utara	0.831
Kota Mataram	0.537
Kota Bima	0.798

Sumber: Hasil Survei (data diolah)

Secara garis besar angka gini ratio di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB termasuk kategori sebagai ketimpangan tinggi, hal ini digambarkan oleh Kabupaten/Kota yang memiliki gini ratio >0,5. Jika dilihat dari masing-masing kelompok pengeluaran Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, Kota Mataram merupakan salah satu Kota/Kabupaten yang kelompok pengeluarannya di dominasi oleh non makanan yang menunjukkan angka 55,56%, hal ini juga menandakan bahwa di Kota Mataram rata-rata penduduknya mempunyai pendapatan yang lebih jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi NTB sehingga cukup untuk kebutuhan makanan.

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan pada dasarnya saling berkaitan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan didahulukan sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi yang dibelanjakan untuk bukan makanan (BPS, 2018).

Berdasarkan tabel 4.13. Terlihat bahwa Kabupaten Lombok Barat merupakan kabupaten yang berada pada ketimpangan paling tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB pada tahun 2017, dengan nilai gini ratio adalah sebesar 0,976 ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh besarnya pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan atau pengeluaran di Kabupaten Lombok Barat.

Untuk lebih jelas lagi dilihat dari grafik kurva Lorenz yang menggambarkan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

Sumber: Hasil Koefisien Gini

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dari penelitian Indeks Gini Ratio antar Kabupaten/Kota di Provinsi NTB ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa Indeks Gini Ratio antar Kabupaten/Kota di Propinsi NTB $>0,5$ angka ini 1. menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di provinsi NTB memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi. Kabupaten Lombok Barat menjadi Kabupaten yang memiliki tingkat ketimpangan yang paling tinggi dengan nilai Gini Ratio pada tahun 2017 adalah 0,976. ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh besarnya pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan atau pengeluaran di Kabupaten Lombok Barat.

Sedangkan Kota Mataram memiliki tingkat pemerataan paling tinggi dengan jumlah Gini Ratio adalah 0,537 dari semua kabupaten di Provinsi NTB. Kabupaten/kota lainnya juga mengalami ketimpangan dengan nilai Gini Ratio yang tidak jauh beda dan relatif tinggi. Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai Gini ratio pada tahun 2017 adalah 0,917, kabupaten Lombok Timur dengan nilai Gini Ratio pada tahun 2017 adalah 0,816, Kabupaten Sumbawa dengan nilai Gini Ratio pada tahu 2017 adalah 0,891, Kabupaten Dompu dengan nilai Gini ratio pada tahun 2017 adalah 0,915, Kabupaten Bima dengan Nilau Gini Ratio pada tahun 2017 adalah 0,777, Kabupaten Sumbawa Barat dengan nilai Gini Ratio pada tahun 2017 adalah 0,913, Kabupaten Lombok utara dengan nilai Gini Ratio pada

tahun 2017 adalah 0,831, dan Kota Bima dengan nilai Gini ratio pada tahun 2017 adalah 0,798.

B. Saran

1. Meningkatkan kualitas pelayanan ditingkat daerah rena untuk mendapatkan awal yang baik bagi generasi selanjutnya adalah meningkatkan pelayanan didaerah sehingga dapat memperbaiki kualitas kesehatan, pendidikan, dan peluang keluarga berencana.
2. Mendukung penciptaan lapangan kerja dan keterampilan yang lebih baik, pekerja saat ini yang mengalami awal karir yang kurang baik dapat meningkatkan keterampilan mereka melalui berbagai bentuk pelatihan, selanjutnya pemerintah dapat membantu dengan memastikan ketersediaan pekerjaan yang lebih baik melalui iklim investasi yang lebih kondusif dan pendekatan peraturan yang lebih fleksibel.
3. Kebijakan fiskal yang tepat, kebijakan fiskal dan penggunaan anggaran yang tepat dari pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik saat ini dan peluang yang adil kelak. Penggunaan anggaran dapat mempengaruhi ketimpangan sekarang, sekaligus mengurangi potensi pemusatan kekayaan dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln *"Ekonomi Pembangunan"* STIEYKPN, Yogyakarta, 1999.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Propinsi NTB Dalam Angka 2018. Diakses dari <http://www.bps.co.id/>.
- Chaves, A. Rodrigo. 2016. *Ketimpangan Yang Semakin Lebar*. Indonesia: World Bank.
- Hajiji, 2010. *Pertumbuhan Ekonomi, Ketidakmerataan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2002-2008(Tesis)*: Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Iswanto, Denny. 2015. *Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur*. Journal.uinjkt.ac.id

- Rahayu S, 2000. *Analisis Pemerataan Pendapatan Usahaternak Sapi Perah Rakyat (Survey Pada Peternakan Sapi Perah Rakyat di KUD Mitra Yasa Kabupaten Tasikmalaya)*. Fakultas Peternakan, Sumedang. Universitas Padjadjaran
- Sen, A. 1981. *Poverty and Famines: An Essay Entitlement and Deprivation*. Oxford University Press.
- Surakhmad, Winarno. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Transito.
- Suryana. 2007. *Tahap-tahapan Penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.